



Peran Protokol dan Komunikasi Pimpinan dalam Mendukung Program Pembangunan Daerah di Kota Bukittinggi

Stevani Novalia

Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

Alamat: Jl. Gurun Aua, Kubang Putiah, Kec. Banuhampu, Kota Bukittinggi

Korespondensi penulis: novaliastevani@gmail.com

Abstrak. This study aims to describe the role of the Protocol and Leadership Communication Division (Prokopim) in supporting regional development programs in Bukittinggi City. A qualitative descriptive method was applied through observation, documentation, and direct involvement during the internship. The findings reveal that Prokopim plays a strategic role not only in protocol activities but also as a public communication hub that conveys development messages, builds the government's positive image, and bridges interactions between local leaders and the community. The integration of Islamic economic values such as trust (amanah), justice, and public benefit (maslahah) is reflected in its administrative practices. Nevertheless, challenges remain, including limited human resources, communication facilities, and the gap between ceremonial aspects and substantive policies. Thus, Prokopim is crucial in realizing transparent, participatory, and community-oriented development communication.

Keywords: Prokopim, Development Communication, Public Administration, Islamic Values

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peran Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan (Prokopim) dalam mendukung program pembangunan daerah di Kota Bukittinggi. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif melalui observasi, dokumentasi, dan keterlibatan langsung selama pelaksanaan magang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Prokopim memiliki peran strategis tidak hanya sebagai pelaksana keprotokolan, tetapi juga sebagai pusat komunikasi publik yang menyampaikan pesan pembangunan, membangun citra positif pemerintah, serta menjembatani interaksi antara pimpinan daerah dan masyarakat. Integrasi nilai-nilai ekonomi Islam seperti amanah, keadilan, dan maslahah tercermin dalam praktik administrasi yang dijalankan. Namun, terdapat tantangan berupa keterbatasan sumber daya manusia, sarana komunikasi, dan kesenjangan antara aspek seremonial dengan substansi kebijakan. Dengan demikian, keberadaan Prokopim sangat penting dalam mewujudkan komunikasi pembangunan yang transparan, partisipatif, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Kata Kunci: Prokopim, Komunikasi Pembangunan, Administrasi Publik, Nilai Islam

PENDAHULUAN

Pembangunan daerah merupakan salah satu aspek fundamental dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus mewujudkan pemerataan pembangunan nasional. Sebagai bagian integral dari sistem pemerintahan Indonesia, pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam merencanakan, melaksanakan, serta mengevaluasi berbagai program pembangunan sesuai dengan potensi dan kebutuhan masyarakatnya. Keberhasilan pembangunan daerah tidak hanya bergantung pada aspek teknis perencanaan dan implementasi, melainkan juga dipengaruhi oleh efektivitas komunikasi antara pimpinan daerah dengan masyarakat serta para pemangku kepentingan. Komunikasi pimpinan memiliki peran strategis sebagai instrumen penyampaian kebijakan, penguatan citra kepemimpinan, serta sarana penghubung antara pemerintah dengan publik. Menurut (Effendy, 2019), komunikasi pimpinan tidak hanya bersifat top-down dalam penyampaian kebijakan, tetapi juga bottom-up sebagai wadah untuk mendengarkan aspirasi masyarakat. Dengan komunikasi yang baik, pemerintahan

daerah dapat mewujudkan transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas, yang pada akhirnya menjadi fondasi tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) (Sembiring, 2024).

Dalam struktur pemerintahan daerah, Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan (Prokopim) memiliki kedudukan penting dalam mendukung fungsi kepemimpinan kepala daerah. Tugas protokol tidak hanya sebatas penyelenggaraan acara seremonial, melainkan juga mencakup pengelolaan agenda pimpinan, koordinasi kegiatan resmi, publikasi informasi, serta dokumentasi yang menjadi bagian dari arsip pemerintah. Dengan demikian, Prokopim tidak hanya berfungsi secara administratif, tetapi juga secara strategis sebagai pusat komunikasi publik pemerintah daerah (Herlina, 2020). Hal ini semakin relevan dalam konteks Kota Bukittinggi, yang merupakan salah satu pusat pemerintahan, perdagangan, sekaligus destinasi wisata di Sumatera Barat. Kompleksitas dinamika pembangunan kota memerlukan strategi komunikasi yang efektif agar program-program pemerintah memperoleh dukungan dan partisipasi masyarakat. Dalam posisi tersebut, Prokopim Sekretariat Daerah Kota Bukittinggi bertindak sebagai penghubung utama antara wali kota dan wakil wali kota dengan masyarakat, lembaga pemerintahan, maupun pihak eksternal lainnya.

Selain aspek teknis dan administratif, integrasi nilai-nilai Islam dalam tata kelola pemerintahan juga menjadi faktor penting di wilayah yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Nilai amanah, maslahah, dan keadilan, sebagai prinsip dasar dalam ekonomi Islam, dapat diterapkan dalam praktik komunikasi pimpinan serta administrasi publik. Pandangan ini sejalan dengan (Rahman, 2021) yang menekankan bahwa penerapan etika Islam dalam birokrasi dapat memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Dengan demikian, analisis mengenai Prokopim tidak hanya relevan dari sisi administrasi dan keprotokolan, tetapi juga dari perspektif nilai-nilai keislaman yang menjadi basis moral masyarakat Bukittinggi. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini difokuskan pada analisis peran Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan dalam mendukung program pembangunan daerah di Kota Bukittinggi. Analisis ini dilakukan melalui studi lapangan berupa kegiatan magang penulis pada periode Juli–Agustus 2025. Pendekatan yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, sehingga data yang diperoleh diharapkan mampu menggambarkan secara mendalam praktik administrasi, komunikasi, serta nilai-nilai yang melekat dalam pelaksanaan tugas Prokopim.

Rumusan masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan dalam beberapa pertanyaan berikut: bagaimana peran Prokopim dalam kegiatan keprotokolan di Kota Bukittinggi? Bagaimana fungsi Prokopim sebagai pusat komunikasi publik dalam mendukung pembangunan daerah? Bagaimana penerapan nilai-nilai ekonomi Islam, khususnya amanah, maslahah, dan keadilan, tercermin dalam praktik administrasi Prokopim? Serta, apa saja tantangan yang dihadapi Prokopim dalam mendukung pelaksanaan program pembangunan daerah?. Sejalan dengan rumusan masalah tersebut, tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan peran Prokopim dalam kegiatan keprotokolan di Kota Bukittinggi, menganalisis fungsi Prokopim sebagai pusat komunikasi publik, mengidentifikasi penerapan nilai-nilai ekonomi Islam dalam praktik administrasi Prokopim, serta menjelaskan tantangan yang dihadapi unit ini dalam mendukung program pembangunan daerah.

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan dua manfaat utama. Pertama, manfaat akademik, yaitu menambah literatur mengenai peran komunikasi pimpinan dan fungsi protokoler dalam konteks pembangunan daerah serta memberikan perspektif baru tentang integrasi nilai-nilai ekonomi Islam dalam administrasi publik. Kedua, manfaat praktis, yaitu memberikan rekomendasi bagi Prokopim Sekretariat Daerah Kota Bukittinggi dalam meningkatkan efektivitas

komunikasi dan keprotokolan, sekaligus menjadi bahan evaluasi untuk memperkuat kapasitas sumber daya manusia serta strategi komunikasi publik guna mendukung pembangunan daerah secara lebih optimal.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan tujuan untuk menggambarkan secara mendalam peran Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan (Prokopim) dalam mendukung program pembangunan daerah di Kota Bukittinggi. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada pemahaman proses, peran, serta dinamika yang terjadi di lapangan, bukan pada pengukuran kuantitatif. Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas:

1. Data primer, yang diperoleh langsung melalui pengalaman lapangan penulis dalam kegiatan magang di Bagian Prokopim Sekretariat Daerah Kota Bukittinggi pada periode 28 Juli–29 Agustus 2025. Selama magang, penulis melakukan observasi partisipatif, mengikuti kegiatan kedinasan, serta berinteraksi dengan pegawai dan pimpinan terkait. Selain itu, wawancara informal juga dilakukan dengan beberapa pegawai untuk memperoleh informasi tambahan.
2. Data sekunder, yang diperoleh melalui studi literatur berupa buku, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, serta dokumen resmi yang relevan dengan tema penelitian, baik terkait protokol pemerintahan, komunikasi pimpinan, maupun nilai ekonomi Islam dalam administrasi publik.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui:

1. Observasi partisipatif, yaitu penulis ikut serta dalam kegiatan protokoler dan komunikasi pimpinan untuk memahami proses secara langsung.
2. Wawancara informal, yang dilakukan dengan pegawai di Bagian Prokopim untuk memperkuat data observasi.
3. Dokumentasi, berupa catatan harian magang, arsip kegiatan, serta publikasi resmi pemerintah kota.

Data yang diperoleh dianalisis menggunakan teknik analisis kualitatif model Miles & Huberman (1994), yang meliputi tiga tahap: Reduksi data (memilah dan menyederhanakan informasi yang relevan), Penyajian data (menyusun informasi ke dalam kategori tematik), Penarikan kesimpulan (membuat interpretasi berdasarkan temuan lapangan dan literatur). Dengan metode ini, penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran komprehensif mengenai peran Prokopim dalam mendukung pembangunan daerah, sekaligus menyoroti integrasi nilai-nilai ekonomi Islam dalam praktik administrasi publik.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Peran Prokopim dalam Kegiatan Keprotokolan

Hasil observasi selama magang menunjukkan bahwa Bagian Prokopim berperan penting dalam memastikan kelancaran kegiatan resmi pemerintahan, baik yang diselenggarakan di Balai Kota maupun di luar kantor. Prokopim tidak hanya mengatur tata upacara dan tata tempat, tetapi juga memastikan keberlangsungan kegiatan sesuai dengan standar keprotokolan yang berlaku. Misalnya, dalam acara pelantikan pejabat, rapat koordinasi antarinstansi, maupun kegiatan kunjungan kerja Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Dalam praktiknya, kegiatan keprotokolan mencerminkan nilai amanah, karena setiap pegawai dituntut untuk menjaga kepercayaan pimpinan dengan melaksanakan acara secara tertib dan profesional. Keberhasilan penyelenggaraan acara tidak hanya meningkatkan wibawa pimpinan daerah, tetapi juga membangun citra positif pemerintah di mata masyarakat. Hal ini sesuai dengan pendapat (Putra,

2020) yang menyatakan bahwa protokol yang efektif mampu menjaga kehormatan pimpinan sekaligus mendukung legitimasi kebijakan publik. Namun, tantangan juga ditemukan dalam keterbatasan sarana pendukung, seperti perlengkapan audio-visual dan sumber daya manusia yang masih terbatas jumlahnya. Kondisi ini kadang menyulitkan ketika pemerintah kota harus menyelenggarakan acara dengan skala besar dan melibatkan banyak pihak.

Prokopim sebagai Pusat Komunikasi Publik

Selain menjalankan fungsi protokoler, Prokopim juga berperan strategis sebagai pusat komunikasi publik. Hal ini terlihat dari aktivitas penyusunan dan distribusi surat resmi, publikasi kegiatan pimpinan melalui media sosial dan website resmi pemerintah, hingga pengelolaan dokumentasi foto dan video. Prokopim secara aktif menyampaikan pesan pembangunan kepada masyarakat, misalnya terkait program kebersihan kota, pengembangan pariwisata, maupun pelayanan publik. Fungsi ini sejalan dengan konsep komunikasi pembangunan yang menekankan keterbukaan informasi agar masyarakat dapat memahami dan mendukung program pemerintah. Dalam praktiknya, Prokopim juga menjembatani komunikasi dua arah antara pimpinan daerah dan masyarakat. Ketika pimpinan menerima masukan atau keluhan warga dalam kegiatan kunjungan lapangan, Prokopim berperan mendokumentasikan serta menyampaikannya kembali kepada instansi terkait untuk ditindaklanjuti. Dengan demikian, Prokopim berfungsi bukan hanya sebagai penyampai pesan, tetapi juga sebagai pengelola informasi publik yang berorientasi pada partisipasi dan transparansi.

Integrasi Nilai Ekonomi Islam dalam Administrasi Publik

Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai-nilai ekonomi Islam, **seperti** amanah, maslahah, dan keadilan, telah tercermin dalam praktik administrasi Prokopim. Amanah terlihat dalam ketelitian pegawai mengelola surat masuk dan keluar agar tidak terjadi kesalahan administrasi. Maslahah tercermin dari orientasi pelayanan yang bertujuan memberikan manfaat bagi masyarakat melalui penyebaran informasi pembangunan secara cepat dan akurat. Adapun prinsip keadilan terlihat dalam perlakuan setara terhadap semua pihak yang terlibat dalam kegiatan, tanpa membeda-bedakan status atau kedudukan. Namun, realitas di lapangan juga menunjukkan adanya tantangan dalam penerapan nilai-nilai tersebut. Misalnya, keterbatasan tenaga teknis menyebabkan distribusi informasi terkadang tidak merata atau mengalami keterlambatan. Selain itu, prosedur birokrasi yang cukup panjang dapat memperlambat pengambilan keputusan dalam situasi mendesak. Tantangan ini menuntut adanya inovasi, misalnya melalui pemanfaatan teknologi informasi yang lebih modern dan peningkatan kapasitas pegawai melalui pelatihan rutin.

Prokopim dan Dukungan terhadap Program Pembangunan Kota Bukittinggi

Secara keseluruhan, keberadaan Prokopim terbukti sangat mendukung pelaksanaan program pembangunan daerah di Kota Bukittinggi. Melalui fungsi protokoler, Prokopim menjaga citra pemerintah dan memastikan agenda pimpinan berjalan lancar. Sementara melalui fungsi komunikasi publik, Prokopim memastikan pesan pembangunan tersampaikan secara transparan, sehingga masyarakat dapat memahami arah kebijakan pemerintah. Temuan ini sejalan dengan pandangan (Effendy, 2019) yang menegaskan bahwa komunikasi pemerintahan yang efektif mampu memperkuat legitimasi kebijakan dan meningkatkan partisipasi publik. Dengan integrasi nilai Islam, fungsi Prokopim tidak hanya berorientasi pada aspek teknis, tetapi juga pada etika pelayanan yang berlandaskan amanah dan kemaslahatan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian melalui pengalaman magang di Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan (Prokopim) Sekretariat Daerah Kota Bukittinggi, dapat disimpulkan bahwa Prokopim memiliki peran strategis dalam mendukung pelaksanaan program pembangunan daerah. Prokopim tidak hanya bertugas pada aspek keprotokolan yang berkaitan dengan tata upacara dan tata tempat, tetapi juga menjalankan fungsi penting sebagai pusat komunikasi publik. Melalui pengelolaan surat resmi, dokumentasi, publikasi kegiatan pimpinan, serta fasilitasi komunikasi dengan masyarakat, Prokopim berkontribusi besar dalam memastikan kebijakan pembangunan tersampaikan secara jelas, transparan, dan tepat sasaran. Selain itu, praktik administrasi di Prokopim telah mencerminkan integrasi nilai-nilai ekonomi Islam, seperti amanah dalam pengelolaan tugas, maslahah dalam orientasi pelayanan publik, serta keadilan dalam perlakuan setara terhadap seluruh pihak. Nilai-nilai ini memperkuat citra pemerintah dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan daerah. Meskipun demikian, penelitian ini juga menemukan adanya tantangan, seperti keterbatasan sumber daya manusia, sarana komunikasi yang belum optimal, serta adanya kesenjangan antara kegiatan seremonial dan substansi kebijakan. Hal ini menunjukkan bahwa Prokopim perlu terus beradaptasi dan berinovasi untuk dapat menjalankan perannya lebih efektif dalam mendukung pembangunan Kota Bukittinggi.

DAFTAR PUSTAKA

- Effendy, O. U. (2019). *Ilmu Komunikasi: Teori dan Praktek*. Remaja Rosdakarya.
- Herlina, D. (2020). Komunikasi publik dalam tata kelola pemerintahan daerah. *Jurnal Administrasi Publik Indonesia*.
- Putra, A. (2020). Peran komunikasi pimpinan dalam mendukung efektivitas organisasi pemerintahan. *Jurnal Komunikasi Pemerintahan*.
- Rahman, F. (2021). Etika administrasi publik dalam perspektif Islam: Studi penerapan nilai amanah dan keadilan. *Jurnal Ekonomi Dan Administrasi Islam*.
- Sembiring, R. A. (2024). Analisis Komunikasi Eksternal Pemerintahan dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan di Liang Melas Datas Kabupaten Karo. *Journal of Governance Innovation*, 6(1), 106–122. <https://doi.org/10.36636/jogiv.v6i1.3400>